

Sejarah jurnalistik di dunia

Awal mula kegiatan jurnalistik dimulai pada zaman romawi kuno ketika julius caesar berkuasa pada tahun 100-44 SM. Kegiatan jurnalistik tersebut dimulai ketika ia membuat peraturan dengan ditempel di semacam papan yang disebut *acta diurna*. *Acta diurna* merupakan kata yang secara harfiah merupakan cikal bakal munculnya kata jurnalistik.

Acta diurna berasal dari bahasa latin yang berarti catatan harian atau laporan harian umum kata acta diurna ini kemudian diadopsi ke bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal yang berarti "hari", "catatan harian", atau "laporan". Dari kata diurnarii muncul kata diurnalis dan journalist (wartawan).

para ahli sejarah mengemukakan fakta lebih kuno bahwa kegiatan jurnalistik dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang pencari dan penyiar kabar (wartawan) pertama di dunia sesungguhnya kantor berita yang pertama di dunia adalah kapal Nabi Nuh (Suhandang, 2004: 26).

Jurnalistik masa kolonial

Bukti yang mengawali terbitnya surat kabar di Indonesia adalah surat kabar tulisan tangan yang bernama Memoria der Nouvelles (Nurudin, 2009: 29) koran ini berisikan berita berita dari Nederland serta kepulauan lainnya.

Dalam bukunya Jurnalistik Indonesia, Haris Sumadiria (2005: 19) mengatakan bahwa aktivitas jurnalistik di Indonesia berlangsung sejak zaman penjajahan kolonialisme Belanda, dengan terbitnya *Bataviasche Nouvelles* yang dikelola langsung oleh para colonial sekitar tahun 1744 dan berisikan tentang kepentingan kolonialisme

Kaum pribumi mulai memiliki surat kabar sendiri pada tahun 1854 dengan terbitnya majalah Bianglala, kemudian disusul majalah mingguan berbahasa Jawa di Surakarta yang bernama Bromartani pada tahun 1855,

Jurnalistik nasional masa kolonial

Sejak lahirnya Boedi Utomo tanggal 20 Mei 1908, sedikit demi sedikit majalah dan surat kabar mulai memasuki wilayah politik, dan inilah yang menandai juga surat kabar dikelola kalangan bumiputra Di kota Solo terdapat majalah bernama Darmo Kondo. Majalah ini semula dimiliki orang Cina,tetapi kemudian diambil alih oleh Boedi Oetomo cabang Solo yang dipimpin oleh R. Toemanggoeng Hardjodipoero

Sejak tahun 1910, pers Indonesia menjadi pers perjuangan yang digunakan untuk membentuk opini bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Sejarah pers di Indonesia tidak lepas dari keadaan masyarakat keseluruhan. Artinya, satu sama lain saling memengaruhi. Kemajuan besar pemimpin gerakan kebangsaan dan keagamaan di Indonesia sekaligus merangkap menjadi pemimpin redaksi atau pembantu dari majalah atau surat kabar dari organisasi yang dipimpinnya.

Jurnalistik pada masa penjajahan jepang

Setelah Jepang menjajah Indonesia pada 9 Maret 1942, surat kabar Belanda dan Cina ditutup. Segala penerbitan kemudian diurus oleh Jepang. Pada zaman Jepang, Jawa dan Madura berada di bawah kekuasaan Balatentara ke XXV, dan wilayah lainnya (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Nusa Tenggara) berada dalam wewenang angkatan laut Jepang.

Penguasa Jawa Madura mengatur sarana publikasi dan komunikasi dengan Undang-undang No. 16. Tahun 1942 Dua segi yang menonjol dari UU itu ialah berlakunya sistem izin terbit dan sensor preventif. Pasal 1 menyatakan bahwa semua jenis barang cetakan harus memiliki izin publikasi atau izin terbit. Pasal 2 melarang semua penerbitan yang sebelumnya memusuhi Jepang untuk meneruskan penerbitannya. Dalam staf redaksi setiap surat kabar ditempatkan penasihat yang disebut Shidooin, yang bertugas melakukan kontrol langsung.

Jurnalistik Orde Lama

Pascakemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945, terjadi euphoria kebebasan pers. Pada saat itu, bermunculan surat kabar dan majalah di Jakarta dan di berbagai kota lainnya di Indonesia. Pada tahun 1950, pers pun merambah ke dalam dunia politik praktis sehingga berpihak dan menjadi corong partai politik. Orang jurnalistik mengenang masa ini sebagai masa dunia pers dipasung dan terjadi kematian, masa yang gelap gulita untuk pers dan jurnalistik (Sumadiria, 2005: 20).

Jurnalistik Orde Baru

Setelah era kemandegan pers dan jurnalistik pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru angin perubahan terjadi seiring semakin profesionalnya kerja para insan pers. Selama 20 tahun masa Orde Baru yang dikomandani oleh Soeharto, pers dan jurnalistik lebih banyak bersinggungan dengan dimensi, unsur, nilai, dan roh ekonomi.

Pada saat Orde Baru, pers tidak banyak berbicara politik, kontrol sosial dan penyalur pendapat umum seakan dipasung oleh penguasa. Apabila melanggar, sanksinya berat. Pers yang menyentuh wilayah kekuasaan akan dibredel. Berbeda dengan lima tahun pertama Orde Baru yang seakan terjadi bulan madu untuk pers dan jurnalistik di Indonesia.

Jurnalistik Orde Reformasi

Setiap kali suatu rezim tumbang, pers menikmati masa bulan madu. Seperti yang ditulis oleh Haris Sumadiria (2005: 21), kelahiran Orde Reformasi setelah Soeharto menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya BJ Habibie, disambut dengan penuh suka cita oleh seluruh rakyat Indonesia. Terjadi euphoria di mana-mana, kebebasan pers/jurnalistik berubah menjadi kemerdekaan pers/jurnalistik.

Di Amerika, jurnalistik berkembang dan mengalami puncaknya sejak tahun 1930-an. Konon, nama Pulitzer dihubungkan sebagai penggagas masuknya kajian jurnalistik ini ke college-college di Amerika Serikat. Begitu pula berkembang di Eropa mata kuliah publisistik yang dikaji di universitas- universitas ternama.

